
PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

Miranda Miryam Maramis¹, Jenny Morasa², Heince R.N Wokas³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :miranda.maramis@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good governance and local financial accounting system to the quality of financial statements SKPD. This research was conducted in Manado City Government. Sampling method in this research is by using quantitative approach, by using primary data through questionnaire. This sample is distributed to 40 financial officers from 10 SKPD of Manado City. For this study data were analyzed by using multiple linear regression with statistical program tool, after classical assumption test fulfilled. The data is processed by using SPSS 21 program. The result of this research indicates that good governance has a significant positive influence to the quality of local financial statements and regional financial accounting system there is no significant positive effect on the quality of local financial statements.

Keywords: Good Governance, Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Financial Report

1. PENDAHULUAN

Good governance bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjalankan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, untuk membawa tingginya aspek pemenuhan hak untuk rakyat, ditetapkannya solidaritas dan keadilan nilai, dan adanya penekanan HAM dalam berbagai kegiatan kehidupan Negara. *Good governance* dipahami sebagai konsep ideologi politik untuk membuat pokok dan prinsip umum tentang pemerintahan untuk dijadikan pegangan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Pelanggaran dalam menyajikan laporan keuangan pada saat ini masih sering terjadi, misalnya melakukan pemalsuan laporan untuk merugikan beberapa kalangan. Kegiatan ini menyatakan betapa pentingnya aktivitas akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dengan baik dalam perusahaan.

Berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia semakin cepat dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah, otonomi daerah adalah syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang merupakan yang memegang amanah wajib untuk memberikan tanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan kegiatan-kegiatan untuk memberi tanggungjawab untuk pihak pemberi perintah. Pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan atas pelaksanaan dana pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya perspektif pengelolaan keuangan sebuah organisasi pemerintahan dilihat dari pengelolaan keuangannya yang baik yang dapat memberikan kepastian tentang suatu kegiatan yang nantinya pemerintah akan melakukan macam-macam usaha dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi. (Ruspina 2013). Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa memberikan kepastian tentang keberhasilan suatu kegiatan yang mencakup semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damyanti 2007:23).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang dibuat oleh organisasi dalam rangka mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya untuk pengambil keputusan, dari pihak internal maupun eksternal organisasi (Libby, dalam Pontoh 2013:2).

2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 ialah penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah yaitu kepala daerah bersama perangkat daerah otonomi dan lain sebagainya adalah badan eksekutif daerah (Abdulah, 2016:83)

2.3 Good Governance

Good governance merupakan suatu rancangan pendekatan yang berprioritas terhadap pembangunan sektor public dari pemerintah yang baik. Negara dengan birokrasi pemerintah diharuskan untuk merubah pola pelayanan dari birokratis etis ke birokratis populis. (Mardiasmo dalam Cahyadi 2016:480)

2.3.1 Konsep Good Governance

Good governance berfokus pada tindakan, fakta atau tingkah laku *Governing* yaitu mengarahkan atau mengatur atau mempengaruhi masalah public dalam suatu Negara. (Horby dalam Jimung (2015:44)

2.3.1 Prinsip Good Governance

Di kutip dari Tangkilisan 2005:115

1. Partisipasi
Setiap warga punya hak suara dalam memberikan keputusan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Penerapan Hukum
Hukum dilakukan secara adil, terutama untuk hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi
Dibuat atas dasar kebebasan informasi yang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.
4. Responsivitas
Lembaga-lembaga dan proses kelembagaan harus melayani setiap stakeholders.
5. Orientasi
Menjadi perantara kepentingan berbeda untuk mendapatkan pilihan baik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. Keadilan
Semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas
Menghasilkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber yang sudah ada sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas
Bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder.
9. Strategi Visi
Pemimpin dan public mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan.

2.4 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah pencatatan, pengikhtisaran, proses pengumpulan data hingga pelaporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah. (Drama 2014:8)

2.4.1 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Memiliki tiga pokok tujuan (Nordiawan, 2008)

1. Pertanggung Jawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

2.4.2 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.4.3 Karakteristik SAKD

SAKD mempunyai karakteristik sebagai berikut (Nordiawan, dikutip dalam Drama, 2008):

1. Basis Akuntansi
Sistem akuntansi pemerintahan menggunakan dua basis akuntansi iyalah cas basic untuk laporan realisasi anggaran dan akrual basic untuk neraca.
2. Sistem Pembukuan
Sistem pembukuan untuk pemerintah memakai sistem pembukuan berpasangan,

2.5 Sistem Akuntansi

Menurut Albugis 2016:80 Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

1. Sistem Akuntansi
Di susunan pemerintah daerah, OPD merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban untuk membuat pencatatan atas transaksi pendapatan, belanja, aset, dan selain kas terjadi dilingkungan suatu kerja.
2. Keuangan Daerah
Keuangan daerah iyalah kewajiban dan semua hak yang dinilai berdasarkan uang ataupun barang yang bisa menjadi aset daerahselama tidak dimiliki daerah yang lebih tinggi, negara ataupun pihak lainnya ditinjau dari UUD yang berlaku.

2.5.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menyediakan informasi yang tepat mengenai posisi keuangan untuk semua transaksi yang dikerjakan untuk beberapa pelaporan dalam suatu entitas periode pelaporan.

2.5.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Untuk sumber informasi
2. Untuk kecukupan penerimaan periode berjalan
3. Menyiapkan sejumlah informasi tentang sumber daya ekonomi.
4. Menyajikan suatu informasi laporan kegiatan dan kebutuhan kasnya.
5. Menyiapkan informasi yang berkaitan dengan sumber penerimaan dalam jangka panjang dan pendek dari pemungutan pajak.
6. Menyajikan suatu informasi tentang perubahan posisi entitas keuangan untuk mengetahui suatu kenaikan atau penurunan dari kegiatan yang dilakukan selama pelaporan.

2.5.3 Penggunaan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah berdasarkan SAP 2010 memiliki kelompok-kelompok utama, tapi tak dibatasi pada:

1. Rakyat
2. Perwakilan masyarakat, tim pengawas, dan tim pemeriksa
3. Sekelompok orang yang berperan dalam pelaksanaan donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintahan

2.5.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan informasi akuntansi dalam ukuran-ukuran normative harus memiliki karakteristik kualitatif.

2.6 Laporan Keuangan

2.6.1 Akuntansi Keuangan

Berdasarkan PSAK No.1 Laporan Keuangan yaitu penyajian terstruktur dimulai dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan

Arus kas, kinerja keuangan, dan informasi posisi keuangan berguna dalam penggunaan pengambilan keputusan ekonomi yang merupakan tujuan dari laporan keuangan.(SAK:2009).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilaksanakan menggunakan cara membagikan kuisisioner dan melakukan perhitungan menggunakan aplikasi. Untuk mengevaluasi penerapan *good governance* dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2018 sampai Juni 2018.

3.3 Prosedur Penelitian

1. Identifikasi masalah
2. Masalah yang dibatasi
3. Penetapan masalah
4. Pelaksanaan penelitian
5. Pengolahan dan analisis data
6. Mengumpulkan teori
7. Laporan penelitian akhir

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam hal ini ialah pegawai bagian keuangan OPD Kota Manado.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam hal ini adalah 40 orang pegawai dibagian keuangan yang di ambil dari 10 OPD Kota Manado.

3.5 Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua. Yaitu :

1. Data Primer. Data yang diambil dengan cara langsung kepada sumber dan dikumpul oleh peneliti.
2. Data Sekunder. Data yang diambil dari kutipan peneliti sebelumnya.

Dalam proses penelitian ini, menggunakan beberapa data primer dan sekunder. Data sekunder yaitu data yang merupakan hasil dari pembagian kuisisioner yang di berikan kepada 40 pegawai bagian keuangan di Pemerintah Kota Manado.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara menjalankan kuisisioner, mengelolah data, menarik kesimpulan dan memberikan saran.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ialah analisis linier berganda. Regresi linier berganda ialah metode yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variable independen dan beberapa variable dependen yang datanya dihitung menggunakan aplikasi SPSS 21.

3.7.1 Pengujian Data

3.7.1.1 Pengukuran Variabel

Proses untuk mengetahui hasil atau intensitas informasi berdasarkan orang, peristiwa, gagasan, dan obyek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis.

3.7.1.2 Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas menggunakan cara hubungan timbal balik antara skor masing-masing item pertanyaan. Dan pengujian realibilitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah setiap jawaban yang diberikan responden bisa dipercaya maupun bisa diandalkan.

3.7.1.3 Uji Asumsi Klasik

Ada empat pengujian untuk uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas
2. Uji Heteroskedastisitas

3.8 Uji Linieritas

3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sumber : Sugiyono (2010:407)

Ket:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah
X1 = Good Governance
X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 β_0 = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi untuk variabel bebas
e = Error Term

3.9 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinan (R^2)
Untuk mengukur perbandingan antara variasi Y dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersamaan.
2. Uji Statistik F
Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat.
3. Uji Statistik t
Digunakan untuk menguji hubungan dari masing-masing variabel.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari pengujian ini menyatakan bahwa setiap kenaikan *good governance* sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan akan meningkat. Dan setiap terjadi kenaikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1 maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Dasar

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas menyatakan bahwa *kolmogorov-smirnov test* $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi secara normal.

4.1.2.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya titik yang beraturan dan titik-titik yang menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y.

4.1.2.3 Koefisien Determinan (R^2)

Berdasarkan koefisien determinan (R^2) didapatkan hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.439 yang berarti bahwa 43,9% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya 56,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.3 Hasil Uji Statistik t (pengujian Secara Parsial)

4.1.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian ini secara parsial variabelindependen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Gozali 2013: 98). Dapat diberi kesimpulan bahwa hipotesis $H_0: \beta_1 = 0$ **ditolak** dan hipotesis $H_1: \beta_1 \neq 0$ **diterima**, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan positif antara *Good Governanc* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil penelitian ini dilihat dari nilai signifikan untuk sistem akuntansi keuangan 0,376 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis $H_1 : \beta_2 \neq 0$ **ditolak** dan hipotesis $H_0 : \beta_2 = 0$ **diterima**, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.1.4 Uji Statistik F

TABEL 4.5
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	363.168	2	181.584	16.283	0.000 ^b
Residual	412.607	37	11.152		
Total	775.775	39			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan, Good Governance

4.1.4.1 Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa uji anova atau F test menghasilkan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis $H_0 : \beta_{1,2} = 0$ **ditolak** dan hipotesis $H_1 : \beta_{1,2} \neq 0$ **diterima**, artinya secara simultan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis I dapat dilihat nilai signifikan dari *Good Governance* 0.000 lebih kecil dari 0.05, jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis I diterima (koefisien regresi signifikan positif). Ini berarti secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Ghozali 2013:98). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis $H_0 \beta_1 = 0$ ditolak dan hipotesis $H_1 \beta_1 \neq 0$ **diterima**, yaitu terdapat pengaruh antara *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dilihat dari sisi kualitas jawaban setiap item pertanyaan berkaitan dengan *Good Governance* didapatkan nilai rata-rata jawaban responden 64.4 dari skala 1-5 (tabel 4.1). Nilai tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Manado telah menerapkan *Good Governance* dengan baik. Dilihat dari sisi kualitas jawaban setiap item pertanyaan yang berkaitan dengan Kualitas Laporan Keuangan didapatkan nilai rata-rata jawaban responden 43,275 dari skala 1-5 (tabel 4.1), nilai ini juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Manado telah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang cukup berkualitas. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *Good Governance* maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.

4.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis II dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,376 (tabel 4.1) lebih besar dari 0.05, jika nilai signifikan > 0.05 maka

hipotesis II ditolak (koefisien regresi tidak signifikan positif). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2013:98), sehingga hipotesis $H_1 : \beta_2 \neq 0$ **ditolak** dan hipotesis $H_0 : \beta_2 = 0$ **diterima**, yaitu tidak terdapat pengaruh antara Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dilihat dari kualitas jawab responden terkait dengan variabel Sistem Akuntansi Keuangan dapat dilihat dari total rata-rata jawaban responden, yaitu pegawai bagian keuangan OPD Pemerintah Kota Manado sebesar 30.3 dari skala 1-5. Nilai dari jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan telah diterapkan dengan baik dan jelas. Dilihat dari kualitas jawaban responden untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan cukup tinggi yaitu 43.275 dari skala 1-5.

Tidak adanya pengaruh dari Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, mungkin terjadi karena adanya perbedaan jawaban dari para responden. Dimana Sistem Akuntansi Keuangan yang sudah berkualitas tidak berbanding lurus dengan Kualitas Laporan Keuangan yang ada. Mungkin ada beberapa aspek yang menyebabkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, ini bisa dilihat dari gambaran umum responden, banyaknya pegawai bagian keuangan yang tidak berlatar belakang dari pendidikan akuntansi. Hanya sebagian kecil pegawai bagian keuangan Pemerintah Kota Manado yang berlatar belakang akuntansi yang dipercayakan untuk mengelola bagian keuangan pada OPD Kota Manado, yaitu 30% sedangkan yang berlatar belakang diluar pendidikan akuntansi ada 70%, hal ini mungkin berindikasi pada ketidakpahaman antara aparatur pengelolaan keuangan pemerintah mengenai pedoman pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah akan lebih baik apabila didukung pula dengan pegawai yang berpengetahuan akuntansi yang baik dan diimbangi dengan penerapan yang baik dari Sistem Akuntansi Keuangan.

4.2.3 Penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dilihat dari hasil uji hipotesis III (tabel 4.5) hasil uji anova /F test mendapatkan hasil signifikan 0,000. Dikarenakan hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis $H_0 : \beta_{1,2} = 0$ **ditolak** dan hipotesis $H_1 : \beta_{1,2} \neq 0$ **diterima**, artinya *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan *Good Governance* bila diterapkan dengan Sistem Akuntansi Keuangan secara baik dan benar maka akan terwujud Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah OPD yang sangat berkualitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka kesimpulannya adalah:

1. *Good Governance* mempunyai pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado, yang berarti bagusnya penerapan *Good Governance* maka semakin bagus pula kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. Jika sistem akuntansi keuangan daerah kota Manado telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada dan dilaporkan secara maksimal, serta dibekali dengan pemahaman pengetahuan akuntansi yang baik maka akan tercipta kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik.

3. *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa penerapan *Good Governance* jika dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan secara bersama maka akan terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah yang semakin berkualitas.

5.2 Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa mendapat data secara lengkap dari dinas-dinas, agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Dapat melengkapi metode yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini.

Saran untuk Kantor Walikota Manado:

1. Diadakan sosialisasi mengenai penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan agar pegawai yang ada lebih memahami lebih jelas, sehingga penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan bisa lebih baik dan benar maka akan terwujudnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas.
2. Sebaiknya pegawai bagian keuangan harus berlatar belakang dari pendidikan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah D (2016) Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 1 No 1, Desember 2016. Hal 83-103
- Albugis F Febriana (2016). "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Emba*. Vol 4 no 3 (2016)
- Cahyadi Arif (2016). (Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Perbasis Good Governance Dikecamatan Sukulilo Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2, hal. 479 – 494
- Drama H (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, no 3 (2014).
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim A & Damayanti T (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit : UUP STIM YKPM
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No.1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat
- Jimung Martin. Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pustaka Nusantara. 2015.
- Nordiawan, Deddi. Dkk 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah RI No.71 thn 2010. Tentang SAP
- Pontoh Winston. 2013, Akuntansi Konsep Dan Praktik. Penerbitan Halaman Moeka. Jakarta Barat.
- Ruspina R (2013). Delivery Of Public Services –The Way Forward 31st Edition. `New Delhi India : Agni School Of Business Excellence.
- Tangkilisan I. Hessel Nogi S. 2016. Manajemen Publik. Pt Pratama. Jakarta.
- UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah